

LAPORAN
HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2011



**ANALISIS PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN (PPATK) SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM
MENANGGULANGI *MONEY LAUNDERING* DI INDONESIA**

Peneliti:
Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum (Ketua)
Koesrianti, SH., LL.M., PhD (Anggota)
Astutik.S.H., M.H (Anggota)

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga, sesuai dengan SK Rektor Unair tentang Kegiatan Penelitian Multi Tahun, Pengabdian Kepada Masyarakat Mono Tahun dan Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2011, Nomor 844/H3/KR/2011, Tanggal 20 April 2011

UNIVERSITAS AIRLANGGA
2011

ABSTRAK

Dalam perkembangan pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah dilakukan perubahan yang mendasar dengan diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perubahan mendasar diantaranya diaturnya wewenang PPATK yang lebih luas dibandingkan pengaturan dalam undang-undang sebelumnya meskipun bukan merupakan wewenang penyelidikan dan penyidikan. Wewenang baru diantaranya adalah wewenang pemblokiran, penundaan transaksi, dan penjatuhan sanksi administratif, sesegera wewenang melakukan kerjasama anti pencucian uang dan pengembalian aset hasil tindak pidana.

Dengan wewenang yang dimiliki PPATK akan dapat lebih memaksimalkan perannya sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan akan semakin memperkuat keberadaan PPATK dalam upaya kerjasama pengembalian aset yang dilarikan pelakunya ke luar negeri. PPATK berperan penting dalam program aset recovery terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset, baik pada waktu analisis, maupun pada saat proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Kata Kunci: *Kewenangan PPATK, Penanggulangan Pencucian Uang*

ABSTRACT

In a development setting the crime of money laundering in Indonesia had made fundamental changes to the promulgation of Act No. 8 of 2010 about the Prevention and eradication of the money laundering. Fundamental changes which he organised the authority broader than PPATK settings in the previous legislation was not authorized although investigation and investigation. The new authority is the authority, among others, blocking delay transaction, and the overthrow of administrative sanctions, as soon as the Authority conducted a joint anti money laundering and asset returns results of a criminal offence

With the authority that will be able to further maximize the PPATK its role as focal point in the prevention and eradication of the crime of money laundering and will be increasingly strengthened presence in cooperation efforts returns PPATK assets that the culprit was rushed out of the country. PPATK was instrumental in the asset recovery program, especially in terms of information intelligence in finance for the purposes of assets tracing, both on the analysis, and the investigation, prosecution and proceedings in the courts

Keywords: *authority of PPATK, combating money laundering*